**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sikap *littoral state* merespon ancaman *piracy* di Selat Malaka. Selat Malaka dengan posisinya yang strategis ditambah perannya sebagai *Sea Lanes Of Communication* dan *Sea Lanes Of Trade* menjadikan selat ini sebagai Selat Internasional tersibuk dan terpadat, sehingga selat ini rawan akan tindakan *piracy*. Selat yang di lalui sekitar 72% perdagangan dunia, 50.000 hingga 70.000 kapal per tahun, dan di perkirakan pada tahun 2020 kapal yang melintasi selat malaka mencapai 140.000. Kapal yang melalui Selat Malaka di dominasi oleh kapal Tanker pengangkut bahan bakar minyak dan bahan industri berbagai negara di dunia, sehingga negara-negara di dunia sangat bergantung pada keamanan Selat Malaka.

*Littoral state* menolak adanya intervensi asing yakni pengerahan pasukan militer asing dalam pengelolaan keamanan selat malaka dari ancaman *piracy*. Seperti penolakan terhadap proposal RMSI (*Regional Maritime Security Initiative*) yang di usulkan oleh Amerika Serikat. Bagi *littoral state*, pertama Selat Malaka sepenuhnya adalah tanggung jawab *littoral state* dengan mengacu pada Hukum Laut UNCLOS 1982. Kedua, *littoral state* berpendapat bahwa dengan hadirnya pasukan militer *extra-regional state* dalam pengelolaan keamanan selat malaka dapat membahayakan eksistensi kedaulatan dan integritas *littoral state* sebagai negara yang merdeka.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena *piracy* di selat malaka. Insiden *piracy* di Selat Malaka pada periode 2011-2015 meningkat cukup signifikan, akan tetapi pada tahun 2016 tindakan *piracy* di Selat Malaka hanya terjadi 1 kali yakni *piracy* terhadap Kapal MV *Posh Viking.* Optimalisasi terhadap keamanan selat malaka terus di tingkatkan oleh ketiga *littoral state*. *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP)/ *Malacca Straits Security Initiative* (MSSI) atau biasa dikenal dengan Operasi patroli terkoordinasi MALSINDO dibentuk sebagai respon untuk menangani *piracy* di Selat Malaka.

Kata Kunci: *Piracy*, Selat Malaka, *Littoral State*.